

SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 187 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENILAIAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2021

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kualitas kebijakan pengadaan barang/jasa, perlu dilaksanakan kegiatan penilaian indeks kualitas kebijakan di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penilaian indeks kualitas kebijakan di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dibentuk Tim Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Keputusan Presiden Nomor 125/TPA Tahun 2021 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1033);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
5. Surat Edaran Lembaga Administrasi Negara Nomor 4/K.1/HKM.02.3/2019 tentang Pengukuran Kualitas Kebijakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENILAIAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Tim Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Tim Pelaksana:
 - a. mengidentifikasi indikator penilaian Indeks Kualitas Kebijakan;
 - b. mengumpulkan bukti dukung penilaian Indeks Kualitas Kebijakan; dan
 - c. membahas relevansi bukti dukung dengan indikator penilaian Indeks Kualitas Kebijakan.
2. Tim Penilai:
 - a. menyiapkan bukti dukung penilaian Indeks Kualitas Kebijakan;
 - b. menilai kesesuaian bukti dukung dengan indikator penilaian Indeks Kualitas Kebijakan; dan
 - c. menganalisis bukti dukung penilaian Indeks Kualitas Kebijakan.
3. Tim Verifikator:
 - a. melakukan verifikasi bukti dukung penilaian Indeks Kualitas Kebijakan; dan
 - b. melakukan verifikasi penilaian Indeks Kualitas Kebijakan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2021 dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait serta melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa Kerja Tim Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah terhitung sejak berlakunya Keputusan ini sampai dengan bulan Desember Tahun 2021.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2021

Plt. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENILAIAN INDEKS
KUALITAS KEBIJAKAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA TAHUN 2021

NOMOR : 187 TAHUN 2021

TANGGAL : 13 OKTOBER 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAIAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA TAHUN 2021

Kedudukan dalam Tim	Nama
Pengarah 1	: Sarah Sadiqa
Pengarah 2	: Robin Asad Suryo
Ketua	: Emin Adhy Muhaemin
Pelaksana	: 1. Antonius Lambok Sihombing 2. Rusli Maryadi 3. Octo Army 4. Ilvia Restu Utami 5. Deasy Rachmawati 6. Lailatul Mufarokhah 7. Andi Darmawan 8. Andi Rannualdi 9. Andy Purwa Sejati 10. Annisa Putri 11. Eva Sinaga 12. Yasmine Permata Sari 13. Andri Rachmat Suwardho
Penilai	: 1. Angga Widita Amirul 2. Ermawanto 3. Mieke Eka Putri 4. Firmansyah

Kedudukan dalam Tim	Nama
	<ol style="list-style-type: none">5. Widya Prima Sari Fultanegara6. Andy Martanto7. Sugianto8. Ermawati Septianingtyas9. Tri Susanto10. Adreng Kusuma Ayuningtyas11. Nuraini Darmastuti12. Imam Arumsyah13. Inamawati Mastuti Dewi
Verifikator	: <ol style="list-style-type: none">1. Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia2. Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum3. Biro Perencanaan dan Keuangan4. Inspektorat5. Didi Permana Kurniawan6. Edi Kristiyanto7. Dodi Wahyugi8. Zulhenny9. Yuyu Yulianti10. Fajar Adi Hemawan11. Januar Indra12. Muhammad Firdaus13. Selamat Budiharto14. Ade Rizky Emirsyah

Plt. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA